



**LAPORAN REALISASI KEUANGAN (LRA),
NERACA, LAPORAN OPERASIONAL,
LAPORAN EQUITAS, DAN CATATAN ATAS
LAPORAN KEUANGAN (CALK)**

TAHUN ANGGARAN 2024

DINAS KEHUTANAN

PROVINSI JAMBI

Jl. Arif Rahman Hakim No. 10

Telanaipura Jambi

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelola keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat.

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan berbasis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel sebagai bahan pengambil kebijakan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi.

**KEPALA DINAS
KEHUTANAN PROVINSI JAMBI**

**AKHMAD BESTARI, SH, MH
Pembina Utama Madya/ IV.d
NIP.197405081999031004**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	III
PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB.....	IV
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN.....	5
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	7
II. NERACA	8
III. LAPORAN OPERASIONAL.....	9
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	10
V. NILAI KEWAJIBAN BERUPA UTANG JASA KANTOR.....	11
VI. REKAP BEBAN PENYUSUTAN	12
VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	13
A. PENJELASAN UMUM	13
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	20
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA.....	22
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL.....	26
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	26



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
DINAS KEHUTANAN

Jalan Anef Rachman Hakim No. 10 Telp. (0741) 62295 , Fax. (0741) 61545

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Tahun 2024 Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jambi, Januari 2025
KEPALA DINAS,


AKHMAD BESTARI, SH, MH
Pembina Utama Madya / IV. d
NIP. 197405081999031004

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Tahun 2024 Unaudite Dinas Kehutanan Provinsi Jambi ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024. Realisasi Pendapatan Daerah pada TA 2024 adalah berupa Retribusi Taman Hutan Kenali sebesar Rp.49.689.000,- Realisasi Belanja TA 2024 adalah sebesar Rp. 49.689.000,- atau mencapai 88,73 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp.56.000.000,-

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp.20.335.411.475,86 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp. 101.401.873,59; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp.0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 20.234.009.602,27 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0,- Nilai Kewajiban berupa utang Jasa Kantor sebesar Rp. 8.918.227,- dan jumlah Ekuitas sebesar Rp. 20.321.629.620,86,-

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 49.689.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional terdiri dari beban pegawai sebesar Rp. 43.384.315.423,- beban barang dan jasa sebesar Rp. 17.285.016.469,-

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 adalah sebesar Rp.21.751.157.451,60

dikurangi Defisit-LO sebesar Rp (62.557.342.196,38) sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp. 20.321.629.620,86 , -

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan berbasis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 dan
31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
	ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN	56.000.000	49.689.000		
Penerimaan Retribusi Daerah	56.000.000	49.689.000	88,73	-
JUMLAH PENDAPATAN	56.000.000	49.689.000	88,73	-
				0,00
BELANJA	64.976.935.886	61.272.527.670	94,30	54.407.780.076
Belanja Operasi	64.366.958.441	60.685.005.300	94,28	54.040.579.876
Belanja Pegawai	45.046.290.527	43.399.988.831	96,35	42.144.498.737
Belanja Barang dan Jasa	19.320.667.914	17.285.016.469	89,46	1.773.859.626
Belanja Hibah	-	-	-	-
Belanja Modal	609.977.445	587.522.370	96,32	1.238.900.480
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.977.445	587.522.370	96,32	1.143.230.838
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	95.669.642
SURPLUS / (DEFISIT)	(64.920.935.886)	(61.207.365.262)	94,28	(61.065.822.477,0)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(65.517.284.991)	(60.928.966.315)	93,00	(14.669.663.154)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
NERACA
PER 31 DESEMBER 2024 dan 31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas lainnya dan setara Kas	-	-
Piutang Bukan Pajak	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	-	-
Penyisihan Utan Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	-	-
Beban Dibayar Dimuka	-	-
Pendapatan yang Masih Harus di Terima	-	-
Persediaan	101.401.873,59	106.029.053,95
JUMLAH ASET LANCAR	101.401.873,59	106.029.053,95
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Non Permanen	-	-
Investasi Permanen	-	-
Penyisihan Piutang dana bergulir dari investasi non permanen	-	-
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	-	-
ASET TETAP		
Tanah	-	-
Peralatan dan Mesin	47.500.891.148,00	26.987.628.778
Gedung dan Bangunan	14.736.707.877,65	14.736.707.877,65
Jalan, Jaringan dan Irigasi	6.989.318.150,00	6.989.318.150
Aset Tetap Lainnya	222.142.963,00	222.142.963
Konstruksi dalam pengerjaan	148.350.000,00	148.350.000
Akumulasi Penyusutan	- 29.363.400.536,38	- 27.488.456.806,36
Jumlah Aset Tetap	20.234.009.602,27	21.595.690.962,29
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	-	-
Aset Tidak Berwujud	13.948.290,00	13.948.290
Aset Lain-Lain	6.821.131.397,91	6.821.131.398
Jumlah Aset Lainnya	-	79.240.896,36
JUMLAH ASET	20.335.411.475,86	21.780.960.913
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Pendapatan Diterima di Muka	-	-
Utang Belanja	8.918.227,00	29.803.461
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	8.918.227,00	29.803.461
JUMLAH KEWAJIBAN	8.918.227,00	29.803.461
EKUITAS		
Ekuitas	20.321.629.620,86	21.751.157.451,60
JUMLAH EKUITAS	20.321.629.620,86	21.751.157.451,60
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20.330.547.847,86	21.780.960.913

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang dan Jasa	19.320.667.914	17.285.016.469	89,46
Belanja Barang	5.937.551.605	5.477.599.826	92,25
Belanja Barang Pakai Habis	5.937.427.605	5.477.475.826	92,25
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	124.000	124.000	100,00
Belanja Jasa	3.184.728.732	2.952.458.192	92,71
Belanja Jasa Kantor	2.728.048.732	2.539.688.192	93,10
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	0	0	#DIV/0!
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	420.300.000	412.770.000	98,21
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	4.950.000	0	-
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0	0	#DIV/0!
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	31.430.000	0	-
Belanja Pemeliharaan	616.568.683	436.433.639	70,78
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	605.848.683	425.713.639	70,27
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.720.000	10.720.000	100,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas	8.488.075.894	7.329.296.812	86,35
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.488.075.894	7.329.296.812	86,35
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.093.743.000	1.089.228.000	99,59
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.093.743.000	1.089.228.000	99,59
BELANJA MODAL	609.977.445	587.522.370	96,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.977.445	587.522.370	96,32
Belanja Modal Alat Besar	48.219.960	48.174.000	99,90
Belanja Modal Alat Bantu	48.219.960	48.174.000	99,90
Belanja Modal Alat Angkutan	125.949.070	123.475.070	98,04
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	125.949.070	123.475.070	98,04
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.175.275	67.016.000	99,76
Belanja Modal Alat Kantor	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	67.175.275	67.016.000	99,76
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	146.681.350	142.472.500	97,13
Belanja Modal Alat Studio	132.708.850	128.500.000	96,83
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	13.972.500	13.972.500	100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Komputer	155.859.390	140.524.800	90,16
Belanja Modal Komputer Unit	89.996.400	89.798.800	99,78
Belanja Modal Peralatan Komputer	65.862.990	50.726.000	77,02
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	4.082.400	3.955.000	96,88
Belanja Modal Alat Bantu Produksi	4.082.400	3.955.000	96,88
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	62.010.000	61.905.000	99,83

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 dan
31 DESEMBER 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	21.780.960.912,60	-
SURPLUS/DEFISIT LO	(61.207.365.362,00)	(61.065.822.477,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN	-	-
Koreksi Nilai Persediaan	-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya	-	-
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset	-	-
Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan	-	-
Keluaran aset Tetap	-	-
Koreksi Ekuitas Nilai Investasi Permanen	-	-
Koreksi Ekuitas Lain-Lain	-	-
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	61.222.838.670,00	-
EKUITAS AKHIR	20.335.411.475,86	21.780.960.912,60

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Laporan Keuangan

V. NILAI KEWAJIBAN BERUPA UTANG JASA KANTOR
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
NILAI KEWAJIBAN BERUPA UTANG JASA KANTOR
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH (Rp)	KETERANGAN
1	Tagihan Air	625.126	
	- KPHP Kerinci	121.600	Desember
	KPHP Sarolangun	260.193	Desember
	KPHP Batanghari	243.333	Desember
2	Tagihan Internet	7.282.280	
	- KPHP Batanghari	513.100	Desember
	- KPHP Bungo	629.650	Desember
	- KPHP Tanjabbar	949.500	Oktober s/d Desember
	- Dishut/PPH	750.000	November s/d Desember
	- KPHP Sarolangun Hulu	1.844.280	Oktober s/d Desember
	- KPHP Merangin	435.400	Desember
	- KPHP Muaro Jambi	640.750	Desember
	- KPHP Kerinci	815.300	Desember
	- KPHP Tebo Timur	335.500	Desember
	- KPHP Tebo Barat	368.800	Desember
3	Tagihan Listrik	1.010.821	
	- KPHP Tanjab Barat	1.010.821	Oktober
	Jumlah	8.918.227	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

VI. REKAP BEBAN PENYUSUTAN
DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
REKAP BEBAN PENYUSUTAN
PER 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BIDANG BARANG	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	KET
1	PERALATAN DAN MESIN	27.500.891.148,00	(23.381.951.000,28)	
2	GEDUNG DAN BANGUNAN	14.736.707.877,65	(3.607.432.473,36)	
3	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	6.989.318.150,00	(2.374.017.062,74)	
4	ASET TETAP LAINNYA	222.142.963,00	-	
5	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)	148.350.000,00	-	
6	ASET LAINNYA	6.821.131.397,91	(6.821.131.397,91)	

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

VII. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Dinas Kehutanan Provinsi Jambi

Tugas Pokok Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2021-2026 termasuk dalam misi :

1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Bersih, Transparan, Akuntabel dan partisipatif yang berorientasi pada pelayanan publik melalui Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur.
2. Menjaga situasi daerah yang Kondusif, toleransi antar umat beragama dan kesadaran hukum masyarakat melalui Program Pemanfaatan Sumber Daya Hutan.
3. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas infrastruktur umum, Pengelolaan energi dan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tercantum dalam Misi Provinsi Jambi yakni menuju Jambi MANTAP 2029 melalui Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Entitas berkedudukan di Jalan Arif Rahman Hakim No.10 Telanaipura Jambi.

Implementasi Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014, Tentang Pemerintahan Daerah, dengan ditariknya kewenangan kehutanan dari kabupaten/kota sehingga dalam menjalankan amanah dalam pengelolaan hutan ditingkat tapak Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dibantu dengan 12 UPTD yang terdiri dari 11 UPTD KPHP dan 1 UPTD Tahura.

Dalam pengelolaan anggaran Dinas Kehutanan Provinsi Jambi tidak terlepas dari Neraca Pembangunan Provinsi Jambi, dimana Kepala Dinas sesuai dengan Tupoksinya bertindak sebagai Penggunaan Anggaran.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi Jambi.

SIPD dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.3. Basis Akuntansi

Dinas Kehutanan Provinsi Jambi menerapkan akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Daerah.

- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan- LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasikan , yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Dinas Kehutanan Provinsi Jambi adalah Pendapatan Retribusi Daerah;
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUD.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh BPKPD Provinsi Jambi.
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

- **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;

- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp.1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau kurang dari Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus

yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Daerah.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 19 tahun 2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Daerah berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Daerah. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek**
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang**
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1 Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.49.689.000,00 atau mencapai 88,73 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 56.000.000. Pendapatan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi berasal dari Retribusi Taman Hutan Kenali Pal XI. Menurunnya realisasi penerimaan Daerah dari Retribusi Taman Hutan Kenali Pal XI karena kurangnya sarana dan prasarana pendukung untuk daya tarik pengunjung.

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2024 adalah sebesar Rp. 61.272.527.670 atau 94,30 persen dari anggaran belanja sebesar Rp. 64.976.935.886 Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	45.046.290.527	43.399.988.831	96,35
Belanja Barang dan jasa	19.320.667.914	17.285.016.469	89,46
Belanja Modal peralatan dan Mesin	609.977.445	587.522.370	96,32
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	#DIV/0!
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Total Belanja Kotor	64.976.935.886	61.272.527.670	94,30
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	64.976.935.886	61.272.527.670	94,30

B.3 Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2024 adalah sebesar Rp. 17.285.016.469 atau 89,46 % dari anggaran sebesar Rp. 19.320.667.914 dengan rincian sebagai berikut :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang dan Jasa			
Belanja Barang	19.320.667.914	17.285.016.469	89,46
Belanja Barang Pakai Habis	5.937.551.605	5.477.599.826	92,25
Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	5.937.427.605	5.477.475.826	92,25
Belanja Jasa	124.000	124.000	100,00
Belanja Jasa Kantor	3.184.728.732	2.952.458.192	92,71
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	2.728.048.732	2.539.688.192	93,10
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	0	0	#DIV/0!
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	420.300.000	412.770.000	98,21
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	4.950.000	0	-
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0	0	#DIV/0!
	31.430.000	0	-
Belanja Pemeliharaan			
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	616.568.683	436.433.639	70,78
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	605.848.683	425.713.639	70,27
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	10.720.000	10.720.000	100,00
	0	0	#DIV/0!
Belanja Perjalanan Dinas			
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	8.488.075.894	7.329.296.812	86,35
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	8.488.075.894	7.329.296.812	86,35
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.093.743.000	1.089.228.000	99,59
	1.093.743.000	1.089.228.000	99,59
BELANJA MODAL	609.977.445	587.522.370	96,32
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	609.977.445	587.522.370	96,32
Belanja Modal Alat Besar	48.219.960	48.174.000	99,90
Belanja Modal Alat Bantu	48.219.960	48.174.000	99,90
Belanja Modal Alat Angkutan	125.949.070	123.475.070	98,04
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	125.949.070	123.475.070	98,04
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pertanian	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Pengolahan	0	0,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	67.175.275	67.016.000	99,76
Belanja Modal Alat Kantor	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	67.175.275	67.016.000	99,76
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	146.681.350	142.472.500	97,13
Belanja Modal Alat Studio	132.708.850	128.500.000	96,83
Belanja Modal Alat Studio	13.972.500	13.972.500	100,00
Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Alat Laboratorium	0	0	#DIV/0!
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	155.859.390	140.524.800	90,16
Belanja Modal Komputer	89.996.400	89.798.800	99,78
Belanja Modal Komputer Unit	65.862.990	50.726.000	77,02
Belanja Modal Peralatan Komputer	4.082.400	3.955.000	96,88
Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi	4.082.400	3.955.000	96,88
Belanja Modal Alat Bantu Produksi	62.010.000	61.905.000	99,83
Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi			

B.4 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2024 adalah sebesar Rp. 587.522.370 atau 96,32 % dari anggaran Rp. 609.977.445 Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

B.4.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan mesin TA 2024 adalah Rp. 587.522.370 atau 96,32 % dari anggaran Rp. 609.977.445

B.4.2 Belanja Modal Bangunan dan Gedung

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan TA 2024 adalah 00 atau 00 Dari anggaran Rp. 00

B.4. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 adalah Rp.0-

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Uang Tunai	-	-
Bank Tabungan Negara Jambi No rek 101001806	-	-
kwitansi UP yang belum di SP2D kan	-	-
Jumlah	-	-

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.49.689.000,- Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya Pendapatan Retribusi Daerah terdapat Anggaran estimasi penerimaan sebesar Rp.56.000.000, yang terealisasi sebesar Rp.49.689.000,-

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas TA 2024 dan 2023

Keterangan	TH 2024	TH 2023
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya di KL dari Hibah yang Belum Disahkan	-	-
Jumlah	-	-

C.4 Piutang PNB

Saldo Piutang PNB per tanggal 31 Desember 2024 dan per tanggal 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Piutang PNB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNBP TA 2024 dan 2023

Uraian	TH 2024	TH 2023
Piutang PNBP	-	-
Piutang Lainnya	-	-

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitor.

C.8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp.0 dan Rp.0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.101.401.873,59,95 dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Persediaan TA 2024 dan 2023

Jenis	TH 2024	TH 2023
Alat Tulis Kantor	88 614 081,22	
Bahan Kebersihan	9 052 894,37	
Bahan Kimia	-	
Pupuk	-	
Alat Listrik	3 734 898,00	
Aset yang akan diserahkan pada pihak ketiga	-	
Jumlah	101.401.873,59	

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang terdiri dari :

1. Alat Tulis kantor Rp. 88.614.081,22,-
2. Bahan Kebersihan Rp. 9.052.894,37,-
3. Alat Listrik Rp. 3.734.898,00,-
4. Aset yang akan diserahkan ke pihak ketiga berupa bibit yang diserahkan kemasyarakat

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 0

C.15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 adalah Rp. 27.500.891.148,00 peralatan dan mesin dicatat pada buku Inventaris Barang tersendiri.

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai aset tetap berupa gedung dan bangunan yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 14.736.707.877,65 Gedung dan Bangunan dicatat pada buku Inventaris Barang Tersendiri.

C.17 Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Nilai aset tetap berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 6.989.318.150 Jalan, Irigasi dan Jaringan dicatat pada Buku Inventaris Barang tersendiri.

C.18 Aset Tetap Lainnya

Nilai aset tetap berupa Aset tetap lainnya yang dimiliki Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Jambi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 222.142.963. aset tetap lainnya dicatat pada Buku Inventaris Barang tersendiri.

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai konstruksi dalam pengerjaan Dinas Kehutanan Provinsi Jambi Rp.148.350.000.

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pada Dinas Kehutanan terdapat Saldo Akumulasi. Penyusutan aset tetap per 31 Desember 2024 sebesar Rp. (6.821.131.397,91)

C.21 Aset Tak Berwujud

Pada Dinas Kehutanan terdapat aset tak berwujud per 31 Desember 2024 sebesar Rp. 13.948.290,00

C.22 Aset Lain-Lain

Nilai Aset lain-lain per 31 Desember 2024 sebesar Rp.6.821.131.397,91,-

C.24 Hutang Kepada Pihak Ketiga

Nilai utang kepada pihak ketiga per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0. utang kepada pihak ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C.25 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 Rp.0 Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

C.26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan.

C.27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2024 sebesar Rp.0 merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang dananya tidak mencukupi pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya.

C.28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp. 20.321.629.620,86 dan Rp.21.751.157.451,60 Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 49.689.000,-

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 sebesar Rp. 43.399.988.831,- Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan

D.3 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa tahun 2024 adalah sebesar Rp. 17.285.016.469 ,-

D.4 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp.0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. 20.321.629.620,86

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO Untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp. (61.207.365.362). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas penyesuaian aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0.

E.4 Koreksi Ekuitas Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas penyusutan aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0

E.5 Koreksi Ekuitas Penyesuaian Aset Lainnya

Nilai koreksi ekuitas penyesuaian aset lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0

E.6 Koreksi Ekuitas Perhitungan Mutasi Masuk dan Keluar Aset Tetap

Nilai koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp.0 koreksi ekuitas perhitungan mutasi masuk dan keluar aset tetap merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

PENGGUNA ANGGARAN



AKHMAD BESTARI.SH.MH
Pembina Utama Madya /IV.d
NIP.197405081999031004